



RENCANA KERJA TAHUN 2021

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021. Program dan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Cirebon. Penyusunan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu saran atau masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan kami, mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

Dr. H. HARRY SAFARI M. Drs., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penganggaran Tugas & Fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon	12
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON.....	18
3.1. Tujuan dan Sasaran	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON.....	20
BAB V PENUTUP	21

LAMPIRAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019

Tabel 2.2 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur IT, sumber daya manusia IT, terwujudnya *smart regency* Cirebon sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam membangun Kabupaten Cirebon. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2021.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Tahun 2021 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Cirebon.

3.3. Tantangan dan Peluang Diskominfo Kabupaten Cirebon.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Gambaran kinerja Diskominfo Tahun 2019 diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan *e-Controlling* hingga triwulan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019 hingga triwulan IV. terlampir

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2019 capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada tahun n				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	SPM Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo No.27/PER/M.KOMINFO/12/2010)															
I	Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional:															
	a. Media Massa															
	- Majalah	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 kl	100	100	100	100	100
	- Radio	-	-	6 kl	6 kl	18 kl	-	-	6 kl	6 kl	18 kl	-	-	100	100	100
	- Televisi	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl	12 kl	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl	12 kl	100	100	100	100	100
	b. Media baru															
	- Website	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	100	100	100	100	100
	c. Media Tradisional (kali/tahun)															
	- Pertunjukan rakyat	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl	12 kl	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl	12 kl	100	100	100	100	100
	d. Media interpersonal (kali/tahun)															
	- Pembinaan/ pelatihan/ bimtek/ Sosialisasi,dll	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl	8 kl	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl	8 kl	100	100	100	100	100
	e. Media luar ruang															
	- Selayang pandang	-	2 kl	-	1 kl	1 kl	-	2 kl	-	1 kl	1 kl	-	100	-	100	100
- Wawar keliling	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	100	100	100	100	100	
- Pemutaran Film	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl	12 kl	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl	12 kl	100	100	100	100	100	
II	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan															
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kec	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	40 kec	60%	60%	60%	60%	40 kec	100	100	100	100	100
2	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)															
I	Urusan Komunikasi dan informatika															
	1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	60%	60%	100%	100	100	100	100	100
	2. Cakupan layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

	4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
II	Urusan Statistik																
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	
	Buku “Kabupaten Cirebon dalam angka”			ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	
	Buku “PDRB”	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	100	100	100	
III	Urusan Persandian																
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	
3	IKU Diskominfo																
	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	81% 84 titik	86% 90 titik	92% 96 titik	97% 101 titik	100% 104 titik	73% 86 titik	88% 92 titik	109,6% 114 titik	138,4% 144 titik	113,5% 118 titik	73	88	109,6	138,4	113,5	
	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6 jenis	7 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	150	175	300	300	300	
	Jumlah website instansi pemerintah daerah	28 web	40 web	52 web	64 web	73 web	25 web	31 web	31 web	532 web	170 web	89,29	77,5	59,62	831,25	232,88	
	Jumlah penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi	-	-	1 jenis	3 jenis	3 jenis	-	-	1 jenis	4 jenis	3 jenis	-	-	100	133.3	100	
	Prosentase pengawasan menara telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen statistik yang akurat dan transparan	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat bidang TIK	400 org	155 org	448 org	275 org	665 org	400 org	155 org	448 org	275 org	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah publikasi informasi pembangunan yang tersampaikan	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	100	100	100	100	100	

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua indikator kinerja telah mencapai target. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut :

1. SPM bidang Komunikasi dan Informatika meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar), yaitu:
 - a) Pelaksanaan Diseminasi Informasi (terdapat 5 indikator);
 - b) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (terdapat 1 indikator).

Jumlah semua indikator bidang Komunikasi dan Informatika adalah 6 (enam) Indikator. Hasil pengumpulan template SPM bidang Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa tahun 2015 – 2018 semua indikator ada datanya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah bidang Komunikasi dan Informatika dalam memberikan layanan minimal secara menyeluruh sudah baik. Indikator yang digunakan sesuai Permen Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Capaian beberapa indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika belum memenuhi target nasional.

2. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, IKK Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup 3 urusan, yaitu:
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika (5 indikator)
 - b) Urusan Statistik (3 indikator)
 - c) Urusan Persandian (1 indikator)

Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mempunyai data, sementara pada urusan statistik semua indikator telah memenuhi target. Pada urusan persandian belum mempunyai data pendukung.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang semuanya telah mencapai target yang ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Kab Cirebon

2.3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam

mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik dan diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik

3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i> 2. Masih rendahnya akses publik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya <i>open government</i>
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> 2. Kurangnya fasilitas sarana pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
5	Pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi belum optimal	1. Pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi cukup tinggi	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak keberadaan menara telekomunikasi

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
5. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Terhadap Capaian Nasional

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggungjawab Diskominfo Kabupaten Cirebon pada dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian Nasional. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum menjadi prioritas pembangunan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2019-2024 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja dengan Data Center yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai syarat utama penerapan SPBE.
- b. Ketersediaan informasi publik di era keterbukaan informasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
- c. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam West Java Smart Province dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.
- d. Pesatnya kemampuan *hacker* dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
- e. Pesatnya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.

2. Peluang

- a. Tersedianya berbagai regulasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.

- c. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagai pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.
- e. Adanya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2021. Tetapi masih ada pergeseran anggaran antar program dan kegiatan yang perlu dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian wewenang tupoksi pada bidang. terlampir

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangkapendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistempembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Cirebon yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

KABUPATEN CIREBON

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu **Indeks SPBE**.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel**

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian
- 5) Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.84	3.10	3.30	3.42	3.55
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi public	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 %	56.63	58.05	59.79	61.88	64.05
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 %	36,50	50	61	76.50	90
		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	III	III	IV
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 %	10	9	8	7	6
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25 POIN	3.55	3.65	3.85	3.95	4.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DIKOMINFO
KABUPATEN CIREBON

Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian serta statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Kabupaten Cirebon Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

Sumber, Juni 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

Dr. H. HARRY SAFARI M. Drs., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610815 198603 1 012

LAMPIRAN

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2019**

Tabel 2.2 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan
Tahun 2021**